



RENCANA STRATEGIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN KAMPAR

TAHUN 2023 – 2026



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU
Jl. H.R. Soebrantas Komplek Kantor Bupati Lama
Fax. (0762) 7327021 Bangkinang Kota
E-mail : bpbdkampar@yahoo.co.id
Web Site : <http://bpbd.kamparkab.go.id/pusdalopsb>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah suatu proses yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dalam menentukan sasaran dan strategi atau kegiatan untuk mencapainya. Serta pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya dalam mengoperasikan strategi.

Fungsi rencana strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk menghadapi potensi dan kompleksitas bencana di Kabupaten Kampar. Rencana strategis memuat perencanaan terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Didalam rencana strategis memuat isu-isu strategis kebencanaan di Kabupaten Kampar. Didalam rencana strategis juga memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama lima tahun 2023-2026. Proses penyusunan perangkat daerah dengan mengacu kepada kegiatan-kegiatan lima tahun yang berlalu 2011-2016, kemudian mengalokasikan isu-isu strategis yang merupakan prioritas pada kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana Kabupaten Kampar untuk lima tahun yang akan datang (2023-2026).

Keterkaitan rencana strategis perangkat daerah dengan RPJMD dan dengan rencana kerja perangkat daerah. Didalam RPJMD Kabupaten Kampar, rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk 4 tahun, dimana penyusunannya berpedoman kepada RPJMD daerah dan bersifat indikatif yaitu memuat informasi baik sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen

hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun renstra. Karena sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana, yaitu meningkatkan perlindungan di daerah rawan bencana.

1.2. Landasasan Hukum

Rujukan hukum yang melandasi penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 ini adalah sebagai berikut :

1. Pancasila sebagai Landasan Ideologis
2. Undang-undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional
3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42).
8. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
9. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014
10. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005 – 2025.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklator perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
23. Peraturan Bupati Kampar Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.
24. Surat Edaran Bupati Kampar Nomor : 050.13/Bappeda-I.3/89 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2023-2026)

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dimaksud untuk memberikan pedoman bagi terciptanya keterpaduan, kebersamaan, dan tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, dan juga guna memberikan dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreatifitas untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kampar khususnya Bidang Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan uraian maksud diatas, maka tujuan dari penyusunan rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar adalah :

1. Memberikan pedoman pada seluruh bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, yaitu Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam penentuan skala prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

2. Mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Bupati Kampar dalam Bidang Penanggulangan Bencana khususnya meningkatkan perlindungan di daerah rawan bencana.
3. Membangun sistem akuntabilitas terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dalam penanggulangan bencana.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar 2023-2026 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Meliputi uraian latar belakang penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum

Berisi Uraian Mengenai Tugas, Fungsi Struktur Organisasi, Sumberdaya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan hal hal lain yang dianggap penting.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi uraian mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan, Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar yang dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan yang lebih spesifik.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Uraian mengenai visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang dan menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Penjelasan mengenai indikator kinerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Kampar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, dengan harapan dapat berhasilnya pelaksanaan rencana yang telah terangkum dalam rencana strategis.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD

I. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar disebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kampar yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda Kabupaten Kampar selaku Ex Officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Bab III pasal 4 Perda Nomor 7 Tahun 2010 Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok antara lain :

- Menetapkan Pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- Menyusun, dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang barang;
- Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar lahir sebagai bentuk pro-aktif Pemerintah Kabupaten Kampar terhadap perubahan paradigma penanggulangan bencana dan kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu meninggalkan pola lama yang berfokus pada tanggap darurat menjadi upaya pemecahan persoalan dari sumber masalahnya serta membuat penanggulangan bencana menjadi bagian tak terpisahkan dari program pembangunan pemerintah, mengingat sebagian wilayah Kabupaten Kampar merupakan wilayah rawan bencana.

II. Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dan berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor : 52 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana teknis (UPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar ,mempunyai fungsi:

- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secaraterencana, terpadu dan menyeluruh.
- Pelaksanaan program penanggulangan bencana kebakaran
- Pengkoordinasian dengan unsur terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran.

III. Struktur Organisasi

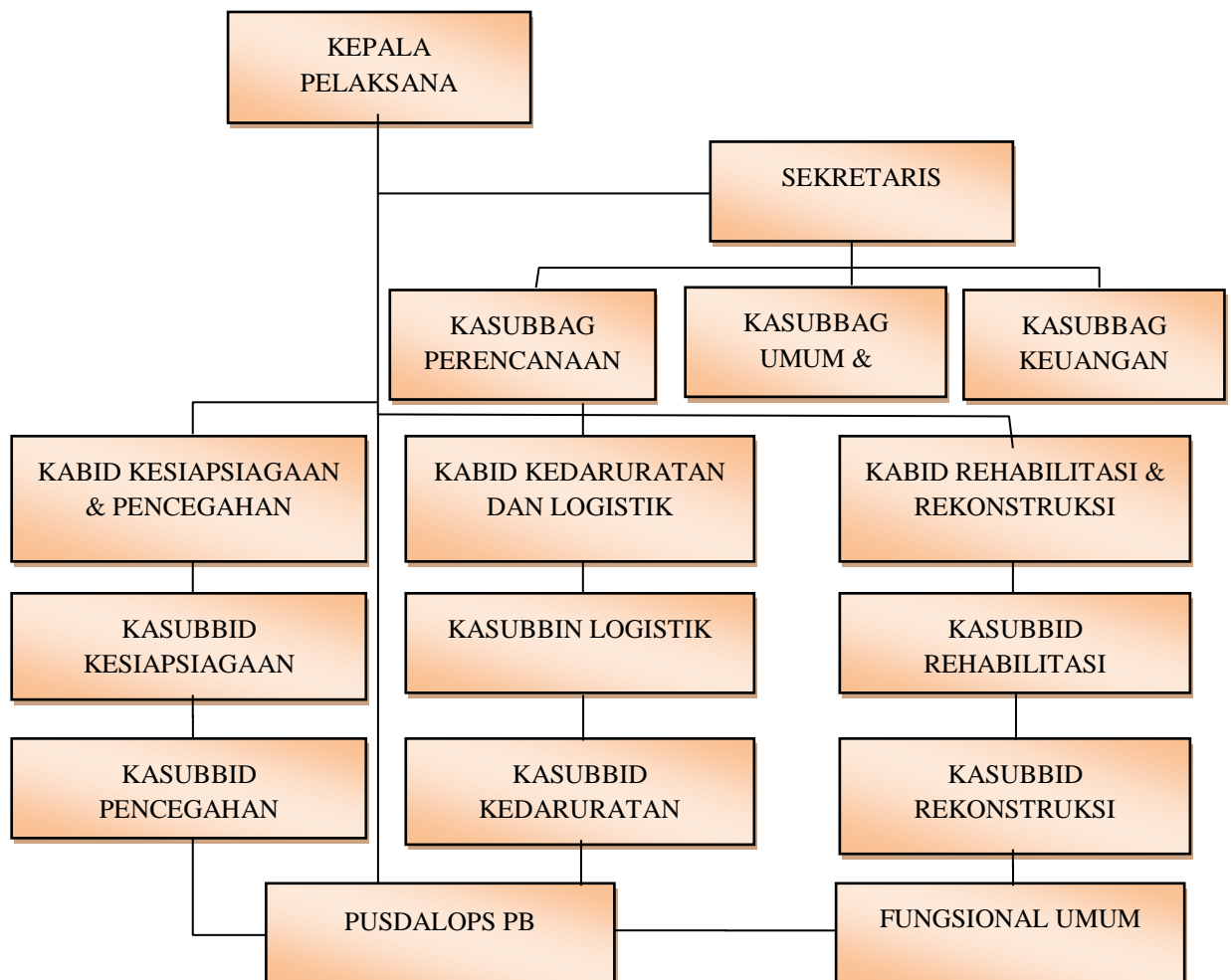
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Kepala Badan (Ex Officio Sekretaris Daerah).
2. Kepala Pelaksana
3. Sekretariat terdiri dari :
 - 3.1. Sub Bagian Perencanaan
 - 3.2. Sub Bagian Keuangan
 - 3.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - 4.1. Sub Bidang Pencegahan
 - 4.2. Sub Bidang Kesiapsiagaan

5. Bidang Kedaruratan dan Logistik yang terdiri dari :
 - 5.1. Sub Bidang Kedaruratan
 - 5.2. Sub Bidang Logistik

6. Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi yang terdiri dari :
 - 6.1 Sub Bidang Rehabilitasi
 - 6.2 Sub Bidang Rekonstruksi



2.2 Sumber Daya BPBD

I. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian dan perlengkapan

1. Kepegawaian

Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Kampar Pada bulan Februari Tahun 2022 tercatat sebanyak 126 (Seratus dua puluh empat) orang terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil : 30 Orang
- b. Tenaga Harian Lepas (THL) : 96 Orang

Secara terperinci kondisi sumber aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dapat digambarkan pada uraian sebagai berikut :

2. Tingkat Pendidikan Personil

Tingkat pendidikan personil/pegawai BPBD Kabupaten Kampar dapat digambarkan pada Tabel I berikut ini :

Tabel II.1
Kondisi Personil BPBD Kabupaten Kampar
Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL	PNS (Orang)	THL (Orang)	JUMLAH (Orang)	PERSEN (%)
1.	S 2	3	-	3	2,38
2.	S 1	18	37	55	43,65
3.	Akademi/Sarjana Muda	-	3	3	2,38
4.	SMA/Sederajat	6	55	61	48,41
5.	SMP/Sederajat	1	1	2	1,58
6.	SD/Sederajat	3	-	2	1,58
	TOTAL	31	96	127	100,00

3. Pangkat/golongan personil

Kondisi kepangkatan/golongan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar posisi Desember 2022 dapat digambarkan pada Tabel I.2 berikut ini :

Tabel II.2
Kondisi Pegawai BPBD Kabupaten Kampar
Menurut Pangkat/golongan Awal Tahun 2022

NO	GOLONGAN/ PANGKAT	JUMLAH (Orang)	PERSENTASE (%)
1	Pembina	6	4,72
2	Penata Tk. I	8	6,29
3	Penata Muda Tk. I	2	1,57
4	Penata	1	0,78
5	Penata Muda	7	5,51
6	Pengatur Tk. I	2	1,57
7	Pengatur	1	0,78
8	Pengatur Muda Tk. I	2	1,57
9	Juru	2	1,57
10	Tenaga Harian Lepas (Non PNS)	96	75,59
	TOTAL	127	100,00

II. Asset/ Modal

1. Gedung / Ruangan

Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar beralamat di Jalan HR. Soebrantas Komplek Kantor Bupati Lama Bangkinang Kota Kode Pos: 28412.

Tabel II. 3 Daftar Barang Inventaris / Perlengkapan BPBD Kabupaten Kampar

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
1	Bangunan Kantor	3	3	-	
2	Permanen	7	7	-	
3	Computer PC Lengkap	16	16	-	
4	Computer Portable (Lap Top)	16	16	-	
5	Printer Laser	2	2	-	
6	Printer Epson Dot Metrik Besar	1	1	-	
7	Printer Epson Dot Metrik	5	5	-	

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
	Kecil			-	
8	Camera	3	3	-	
9	Handy Cam	2	2	-	
10	Infokus/Proyektor	1	1	-	
11	Wireless	1	1	-	
12	Brankas	8	8	-	
13	Lemari Arsip (Sleding)	10	10	-	
14	Filling Kabinet	2	2	-	
15	Kursi Tamu	2	2	-	
16	Meja Tamu	15	15	-	
17	Kursi Hadap	1	1	-	
18	Tenda Posko	2	2	-	
19	Tenda Pleton	3	3	-	
20	Tenda Regu	20	20	-	
21	Velbed	1	1	-	
22	Radio Rig Lengkap	4	4	-	
23	Radio HT	1	1	-	
24	SSB Lengkap	2	2	-	
25	Perahu Karet kap, 10 orang	1	1	-	
26	Perahu Karet kap, 12 orang	1	1	-	
27	Mesin Perahu Karet 30 PK	1	1	-	
28	Sound System	1	1	-	
29	Mobil Dapur Lapangan	2	2	-	
30	Mobil Resque Komando	2	2	-	
31	Motor Trail	2	2	-	
32	Motor Trail (Kawasaki)	1	1	-	
33	Perahu Karet Kapasitas 10 orang	2	2	-	
34	Mesin Perahu Karet kapasitas 18 PK	3	3	-	
35	Tenda Pleton	15	15	-	
36	Tenda Regu	30	30	-	
37	Tenda Keluarga	7	7	-	
38	Velbed	1	1	-	
39	H T	1	1	-	
40	R I G	1	1	-	
41	S S B	2	2	-	
42	Lampu Senter HID	1	1	-	
43	Searchlight	2	2	-	
44	Genset 5 KVA	1	1	-	
45	Water Treatment Portable	3	3	-	
46	Laptop Toshiba	2	2	-	
47	Laptop Asus	3	3	-	
48	Keyboard	3	3	-	
49	Komputer PC	4	4	-	

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
50	CPU	4	4	-	
51	Monitor	1	1	-	
52	Mouse	1	1	-	
53	Speaker Kecil	2	2	-	
54	Camera Nikon	2	2	-	
55	Printer Laser Multi Fungsi	1	1	-	
56	A4 HP			-	
57	Officejet	12	12	-	
58	Printer A3 DISJET	7	7	-	
59	PIXMA 1X-6560	1	1	-	
60	Sound System	1	1	-	
61	Air Conditioner (AC)	1	1	-	
62	Sekat Ruangan	2	2	-	
63	Fornitur dapur	1	1	-	
64	Meja Tennis	4	4	-	
65	Sirine	2	2	-	
66	Laptop (Asus)	2	2	-	
67	Printer	2	2	-	
68	Printer Epson	1	1	-	
69	Baju Selam	2	2	-	
70	Sepeda Motor (Honda)	15	15	-	
71	Mesin Fotocopy Electronic	1	1	-	
72	(CANON)			-	
73	Alat Penghancur Kertas	50	50	-	
74	Papan Pengumuman	1	1	-	
75	Meja Rapat	1	1	-	
76	Kursi Rapat	1	1	-	
77	Televisi	1	1	-	
78	Camera Video	2	2	-	
79	Karpet	20	20	-	
80	Gordyin/Kray	7	7	-	
81	Facsimile	2	2	-	
82	Jas Hujan	7	7	-	
83	PC Unit	1	1	-	
84	Tablet PC	1	1	-	
85	Sepatu Tahan Tekanan	1	1	-	
86	Pompa Air	1	1	-	
87	Pick Up	1	1	-	
88	Perahu Tradisional	1	1	-	
89	Gergaji Chain Shaw	1	1	-	
90	Sofa	1	1	-	
91	Mesin Pemotong Rumput	1	1	-	
92	Karpet	8	8	-	
93	Meja Kerja Pejabat Ess II	1	1	-	
94	Kursi Kerja Pejabat Ess II	1	1	-	

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		Ket
			Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6
95	Handy Talky (Ht)	1	1	-	
96	Rompi Dan Pelindung	1	1	-	
97	Kaki/Tangan	2	2	-	
98	Mini Komputer	9	9	-	
100	Printer	8	8	-	

2.3 Kinerja Pelayanan BPBD

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dalam penanggulangan bencana tidak secara serta merta mengambil alih pekerjaan teknis dari OPD lain dalam penanggulangan bencananya. Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Perda Kabupaten Kampar Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 08 November 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar. Maka BPBD Kabupaten Kampar mempunyai 3 (tiga) fungsi utama Penanggulangan Bencana (PB) yaitu pelaksanaan, koordinasi dan komando.

- a. Sebagai pelaksana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah berfungsi sebagai *leading sector* dan mengkoordinasikan dengan OPD teknis, seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Perumahan dan Pemukiman dan yang terkait dalam bidang pekerjaan teknis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pasca bencana yang dilakukan oleh OPD teknis. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing OPD namun berkoordinasi secara efektif dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga saling menunjang.
- c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk

penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai *incider commander*, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan komando untuk melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang bersamaan OPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera.

Perlu diingat bahwa pendanaan PB tidak hanya berasal dan dikelola oleh BNPB, BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota namun pendanaa PB juga melekat pada kementerian/Lembaga teknis, OPD teknis terkait kebencanaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi terutama BPBD Kabupaten Kampar mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana.

Kabupaten Kampar memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh factor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kampar berada dalam ancaman bencana, antara lain banjir, kebakaran lahan dan hutan, tanah longsor, angin putting beliung, kekeringan dan konflik sosial. Dengan adanya jenis ancaman bencana yang beragam, perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana. Pemerintah daerah Kabupaten Kampar perlu melibatkan semua pihak yang terkait agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu penataan dan perencanaan matang agar tercipta suatu sistem penanggulangan bencana secara terarah dan terpadu.

Tabel II.4
Potensi Bencana Kabupaten Kampar

Potensi Bencana Kabupaten Kampar Berdasarkan Catatan Sejarah	
1. Banjir	5. Epidemi
2. Kebakaran Hutan dan Lahan	6. Konflik Sosial
3. Tanah Longsor/Gerakan Tanah	7. Kegagalan Teknologi
4. Kekeringan	8. Angin Puting Beliung

BPBD Kabupaten Kampar telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan pengurangan risiko bencana sampai tahun 2022 antara lain adalah :

1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Tujuan dan sasaran yang telah dicapai adalah untuk meningkatnya upaya Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risiko Bencana. Kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Sosialisasi penanganan bencana banjir
- b. Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana
- c. Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- d. Pembuatan Leaflet Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.
- e. Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah
- f. Pembentukan dan Pengembangan Desa Siaga Bencana
- g. Evaluasi dan Monitoring Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- h. Sosialisasi Penanganan Bencana Banjir

2. Penanganan Darurat dan Logistik

Tujuan dan sasaran: Meningkatnya Penyelamatan dan Evakuasi Terhadap Korban Bencana, Penanganan Pengungsi dan Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital untuk Aktivitas masyarakat. Kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Bimtek SAR dan Latgab Penyelamatan, Evakuasi Penanganan Pengungsi setiap tahun;
- b. Operasional Darurat dan Logistik
- c. Penyusunan Standarisasi Operasional Pedoman (SOP) Penanganan Darurat
- d. Evaluasi dan Monitoring Bidang Darurat dan Logistik
- e. Koordinasi dan fasilitasi Pemberi Bantuan Bencana Banjir
- f. Fasilitasi dan koordinasi Teknis Darurat Bencana
- g. Operasional Satgas Penanggulangan dan Penanganan Bencana
- h. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Relawan setiap tahun

- i. Pengadaan logistik saat tanggap darurat
- j. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Kebencanaan
- k. Pelatihan Peralatan Bencana

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a. Fasilitas pelayanan pemulihan dan pembangkitan kondisi Wilayah Pasca Bencana
- b. Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- c. Pengkajian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana
- d. Fasilitas dan Koordinasi Penanganan Infrastruktur Pasca Bencana
- e. Evaluasi dan Pemantauan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
- f. Fasilitas dan Koordinasi Penanggulangan Banjir, Kebakaran Lahan dan Hutan dan Angin Putting beliung serta Tanah Longsor.
- g. Pelatihan Teknis Penilaian Damage dan Losses Assesment
- h. Fasilitas dan Koordinasi Penerapan Rancang Bangun dan Peralatan yang tepat dan Aman Bencana
- i. Fasilitasi dan Kerjasama dengan Pihak Lain dalam Rangka Penanganan Pasca Bencana
- j. Perbaikan Lingkungan Wilayah Pasca Bencana
- k. Perbaikan Rumah Masyarakat Korban Bencana

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	IKK	TARGET INDIKATOR LAIN	TARGET RENSTRA TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN TAHUN KE-					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Prosentase Desa Tangguh Bencana di Kabupaten	%	Terwujudnya Pencegahan dan Kearsipan dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB)		4	5	2	1	12	4	4	5	2	1	12	4	100	100	100	100	100	100
2	Angka luasan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar	Angka	Angka luasan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar		41,75	7092	262	45,01	103,98	6	41,75	7092	262	45,01	103,98	6	93	95	96	97	98	98
3	Prosentase penanganan evakuasi korban bencana banjir dan longsor di Kabupaten Kampar	%	Jumlah Penanganan Evakuasi Korban Banjir dan Longsor		60	65	75	80	85	90	60	65	75	80	85	90	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah Fasilitas Pasca Bencana yang terbangun	Jumlah	Jumlah Fasilitas Pasca Bencana		11	11	7	14	25	7	11	11	7	11	25	7	80	90	100	87,27	100	100

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Realisasi Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.290.677.460	1.668.239.828	2.384.882.741	1.288.467.172	-	1.159.771.040	1.519.874.393	2.262.872.265	1.086.864.402	-	89,85	7,55	94,88	84,3	-		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	496.804.500	423.166.000	372.780.800	297.610.600	-	493.081.246	415.099.447	110.880.600	223.685.189	-	99,25	98,09	29,74	75,16	-		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	47.400.000	-	229.680.000	-	-	46.960.000	-	229.538.500	-	-	99,07	-	99,93	-	-		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8.650.000	15.600.000	19.500.000	-	-	8.650.000	15.550.000	19.184.660	-	-	100	99,67	98,38	-	-		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	6.606.500	2.730.000	2.730.000	2.730.000	-	6.606.500	2.730.000	2.730.000	2.730.000	-	100	100	100	100	-		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	114.268.097	126.607.150	235.751.166	178.495.894	-	114.068.097	98.357.150	218.591.166	138.475.894	-	99,82	77,68	92,72	77,57	-		
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	14.517.307.443	14.243.623.600	-	-	-	801.955.343	11.927.668.300	-	-	-	14,22	83,74	-	-	-		

Program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	-	-	1.429.177.650	1.972.512.250	-	-	-	1.409.556.275	1.950.428.720	-	-	-	98,62	98,88			
Program Bidang Kedaruratan dan Logistik	-	-	533.440.550	812.703.990	-	-	-	526.601.482	771.885.490	-	-	-	98,71	94,97	-		
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam dan Kesiapsiagaan	-	-	206.869.555	140.035.225	-	-	-	201.455.155	116.742.525	-	-	-	97,38	83,36	-		
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	7.533.896.564,	-	-	-	-	7.118.214.002	-	-	-	-	94,48		
Program Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	5.154.181.743,	-	-	-	-	5.140.327.289	-	-	-	-	99,73		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan BPBD

2.4.1. Tantangan Pelayanan BPBD :

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar adalah :

- a. Letak geografis dan topografi yang potensial terhadap terjadinya bencana alam dan luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam terdapat 8 (delapan) jenis bencana di wilayah Kabupaten Kampar, yaitu banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor/gerakan tanah, kekeringan, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial, kegagalan teknologi dan angin puting beliung;
- b. Terjadinya anomaly cuaca sebagai dampak dari pemanasan global (global warning);
- c. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat

Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan dipublikasikan pada Bulan Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2016 di Manado adalah :

Beberapa prioritas yang bisa dilakukan untuk menentukan indeks Risiko Bencana Daerah, antara lain :

Prioritas I

Memperkuat kebijakan dan kelembagaan yang efektif untuk membangun ketangguhan di daerah. Regulasi atau payung hukum yang harus dimiliki antara lain.

1. Memiliki Perda Penanggulangan Bencana
2. Memiliki Perda Penanggulangan Bencana Daerah
3. Memiliki Perda Forum Pengurangan Risiko Bencana
4. Memiliki Aturan Penyebaran Informasi Kebencanaan

5. Memiliki Perda Rencana Penanggulangan Bencana
6. Memiliki Perda Tata Ruang Berbasis Pengurangan Resiko Bencana

Prioritas II

Membangun proses perencanaan yang terpadu mempertimbangkan Kajian Risiko Bencana, yaitu :

1. Memiliki kajian risiko bencana dan visualisasi spasial untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.
2. Memiliki Rencana Penanggulangan Bencana berbasis kajian Risiko yang diutamakan kedalam perencanaan pembangunan daerah.

Prioritas III

Mengembangkan system informasi yang terintegrasi dan efektif, yaitu :

1. Memiliki sistem informasi yang menjangkau langsung masyarakat.
2. Memiliki sistem informasi yang terintegrasi antar tingkat pemerintah dari nasional sampai lokal.

Prioritas IV

Mencukupi kualitas dan kualitas logistik daerah dalam mengantisipasi bencana, yaitu:

1. Memiliki pemahaman kebutuhan logistik daerah untuk setiap ancaman bencana.
2. Pengelolaan logistik dengan melaksanakan efektif dan efisien.
3. Tersedianya pemenuhan kebutuhan hidup di masa darurat.

Prioritas V

Meningkatkan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana yaitu :

1. Kemampuan memberdayakan masyarakat dalam membangun ketangguhan desa terhadap bencana.
2. Memperkuat penegakan hukum dan optimalisasi kebijakan.
3. Melakukan restorasi dan konservasi sumber daya alam.

Prioritas VI

Memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana yaitu :

1. Menyiapkan rencana cadangan setiap ancaman bencana.
2. Membangun sistem peringatan dini hulu ke hilir.

Prioritas VII

Mengembangkan sistem pemulihan bencana, yaitu :

1. Membangun infrastruktur penting
2. Membangun pemukiman/rumah penduduk
3. Membangun kehidupan masyarakat

Bentuk-bentuk penguatan yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Bupati Kampar agar mengadakan komitmen yang jelas dan tegas dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di bidang mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, bantuan logistic serta peralatan, dan alokasi dana siap pakai untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Kampar, agar secara persuasive maupun kebijakan untuk dapat meningkatkan peran serta dunia usaha untuk memberikan dukungan logistic dan peralatan dalam program pengurangan Risiko Bencana dan Tanggap Darurat.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar perlu mengalokasikan dana guna meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan potensi bencana, serta memiliki kemauan untuk membangun masyarakat tangguh bencana.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu mendapat dukungan dana untuk mengoptimalkan fungsi teknologi informatika guna membangun system kebencanaan yang terintegrasi dan efektif, menjangkau langsung ke masyarakat, mampu merespon informasi secara efektif, dan terintegrasi sejak dari pemerintah pusat, provinsi daerah dan lokal.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar agar mengalokasikan dana Rapat Koordinasi agar Sekretaris Daerah selaku Ex Officio Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kampar dapat melaksanakan koordinasi secara intensif, terencana, dan terpadu bersama TNI, POLRI, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk menghadapi kegiatan bencana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPBD

1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya telah menimbulkan perubahan mendasar terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain :

- 1) Adanya payung hukum, mandat bagi perlindungan rakyat dari risiko bencana;
- 2) Perubahan cara pandang dari responsif menjadi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan;
- 3) Terintegrasinya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan;
- 4) Penanggulangan bencana diatur, diselenggarakan dan dibiayai oleh anggaran pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah;
- 5) Konsekuensi logis untuk membentuk kelembagaan yang kuat dan semesta;
- 6) Mengatur tentang hak dan kewajiban rakyat, serta keterlibatan berbagai pihak sebagai penyelenggara penanggulangan bencana.

Salah satu yang dirumuskan berdasarkan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana adalah adanya sistem penanggulangan bencana yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain :

- 1) Komponen legislasi mencakup dasar-dasar kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bencana beserta turunan-turunannya dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kota/kabupaten.
- 2) Komponen kelembagaan terkait dengan kedudukan, struktur, tugas pokok, fungsi dan wewenang badan penanggulangan dari tingkat Nasional, Provinsi sampai dengan Kota/Kabupaten.
- 3) Komponen perencanaan terkait dengan program-program penanggulangan bencana dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kota/kabupaten.

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu ‘mainstream’ dalam perencanaan pembangunan. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana sebagai ‘perspektif’ dalam perencanaan;

- 4) Komponen pendanaan, terkait dengan penganggaran dari tingkat nasional, provinsi dan kota/kabupaten. Untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana, sumber dana bisa berasal dari berbagai sumber, dengan tetap memegang prinsip untuk tidak mempergunakan dana-dana yang bisa menimbulkan kerentanan baru, misalnya dana pinjaman luar negeri, dan dari perusahaan yang mempunyai kontribusi merusak lingkungan. Di sisi lain pendanaan untuk program ini harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
- 5) Pengembangan kapasitas disemua komponen penyelenggara penanggulangan bencana baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam semua fase baik prabencana, tanggap darurat maupun pasca bencana merupakan “urusan bersama”, semua sektor/lini, dan tiap-tiap komponen dalam sistem penanggulangan bencana memiliki kontribusi yang sama pentingnya terhadap kesuksesan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar, tanggung jawab dan kewenangan BPBD Kabupaten Kampar adalah dalam kegiatan strategis penanggulangan bencana dijabarkan sebagai berikut :

- a) Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pasca bencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan.

- b) Dalam kondisi tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjalankan fungsi komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- c) Fungsi yang terakhir adalah peran pelaksana, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2010, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar yang dapat dimobilisasi atas komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kapasitas sumberdaya PB di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Kabupaten Kampar yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk

membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

- a. Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana;
- b. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Kampar;
- c. Belum terfasilitasinya gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berfungsi untuk menyimpan logistik dan peralatan bencana;
- d. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
- e. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Kampar;
- f. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar;
- g. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Kampar;
- h. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar;
- i. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Kampar;
- j. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar,
- k. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.

Tabel III.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengurangan risiko bencana	1. Upaya mitigasi sebagai suatu hal yang penting melalui perencanaan penganggaran belum menjadi perhatian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya-upaya yang dilakukan belum maksimal dan masih bersifat parsial belum menyentuh semua lini masyarakat 2. Belum optimalnya penataan ruang yang memperhatikan daerah rawan tinggi bencana 3. Belum tersedianya regulasi/kebijakan tentang penanggulangan bencana di daerah dalam bentuk perda dan perkada 4. Belum tersedianya dokumen teknis kebencanaan (kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana)
		2. Rendahnya kesiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seruan dan himbauan peringatan ancaman bencana kurang direspon 2. Kurang antisipasi dan masih rendah tingkat sadar bencana 3. Masih kurangnya sosialisasi dan simulasi pengurangan resiko bencana 4. Masih kurangnya kelompok siaga bencana 5. Belum memadai ketersediaan sistem peringatan dini bencana 6. Kondisi ekonomi dan sosial kultural masyarakat/ kearifan lokal masyarakat.
2	Kapasitas dalam penanganan bencana	1. Belum optimalnya kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan Bencana Adalah Urusan Wajib Pemerintah Daerah. (UU 23/2014) Tentang Pemerintah Daerah, PP 2/2018 Tentang SPM; Permendagri 101/2018 Tentang Standar Teknis Pada SPM Sub-Urusan Bencana. 2. Kebijakan Penganggaran

			<p>Penanggulangan Bencana Dalam APBD</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Belum optimalnya pembangunan kemitraan Pemerintah dengan para pihak dalam penanggulangan bencana. 4. Kejelasan fungsi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 5. Belum tersedianya Dokumen Aktivasi SKPDB (Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana)
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Masih perlunya peningkatan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya jumlah dan jenis sarana prasarana serta logistik 2. Kapasitas dan kuantitas aparatur yang masih terbatas dan perlu peningkatan

1.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

1.3 Telaahan Renstra Propinsi Riau

Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi Riau telah diatur dalam Peraturan Daerah, tentang Organisasi dan Tata Kerja Struktur Organisasi BPBD Propinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010.

1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan

dan perkotaan dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b) kebijakan pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi: pengembangan kawasan-kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan.

Luasnya wilayah kabupaten Kampar dan merupakan daerah yang langsung berbatasan dengan ibukota Propinsi Riau maka hal ini menimbulkan peluang ekonomi sekaligus menimbulkan ancaman akan

kamtibmas, oleh karena itu diperlukan kewaspadaan dini masyarakat terhadap gangguan dan ancaman yang akan terjadi untuk menjaga ketahanan bangsa dan kesatuan bangsa.

1.5 Penentuan Isu-isu strategis

Berdasarkan analisis tersebut diatas, dalam merumuskan strategis perlu mempertimbangkan factor lingkungan yakni kondisi situasi, keadaan peristiwa yang menjadi isu strategis yang dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran organisasi. Adapun isu-isu bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar adalah :

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra BPBD Kabupaten Kampar tahun 2023-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh BPBD Kabupaten Kampar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas aparatur kebencanaan.
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat kebencanaan.
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efesiensi.
2. Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam kondisi siaga bencana dan tanggap darurat bencana dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Membangun kemampuan dan kolektafitas masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi penanggulangan bencana

- b. Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses penanggulangan bencana
 - c. Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan kelembagaan non pemerintah.
3. Strategi Pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kebencanaan pada saat pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana.
4. Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar dengan arah kebijakan :
- a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Kampar dan BPBD Kabupaten Kampar.
 - b. Melaksanakan penanggulangan bencana yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar SKPD.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Jangka Menengah BPBD

Visi dan Misi hanya dapat direalisasikan jika dirumuskan terlebih dahulu kedalam bentuk yang lebih nyata dan terarah, berupa tujuan dan sasaran. Tujuan ditetapkan berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan, yang berarti organisasi telah memperhitungkan kekuatan dan kelemahan serta segala sumber daya yang dimiliki, sehingga tujuan yang ditetapkan menjadi lebih rasional. Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan, serta merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu sampai dengan lima tahun.

Sedangkan sasaran jangka pendek Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar merupakan penjabaran pencapaian tujuan, yaitu target-target yang akan dicapai dalam waktu satu tahun.

4.2.1 Tujuan

Optimalisasi Penanggulangan Bencana antara lain :

1. Mengembangkan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
2. Mendorong semangat kemandirian, kegotong royongan dan kebersamaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
3. Mewujudkan regulasi yang lengkap dalam penanggulangan bencana
4. Mensinkronisasikan penanggulangan resiko bencana dalam program pembangunan daerah
5. Membangun kemitraan dengan stakeholder dan lembaga peduli bencana dalam penanggulangan bencana.

4.2.2 Sasaran

- Terciptanya SDM dan sarana dan prasarana Program Penanggulangan Bencana

- Terkoordinasinya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana:
 1. Meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana
 2. Mewujudkan program dan kegiatan kebencanaan yang tepat sasaran dalam PRB yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah
 3. Menyediakan regulasi penanggulangan bencana yang komprehensif
 4. Mewujudkan komunitas masyarakat peduli bencana
 5. Membina kerjasama pemerintah, tokoh masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana
 6. Meningkatkan Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana
 7. Meningkatkan partisipasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
 8. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengembangkan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana

- Terlaksananya dan terintegrasinya penanganan tanggap darurat bencana adalah dengan meningkatkan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penanganan pengungsi yang optimal.

- Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana adalah dengan meningkatnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perencanaan.

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik		Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	BB	BB	A	A
			Indeks kepuasan masyarakat	87,98	91,98	93,97	95,97
1.1		Meningkatnya kualitas dan kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah Kab/kota	100	100	100	100
2	Menurunkan resiko bencana daerah		Indeks resiko bencana (IRB)	Sedang (72-66)	Sedang (66-61)	Sedang (61-54)	Sedang (54-48)
		Meningkatnya sinergitas penanggulangan bencana	Penurunan indeks resiko bencana (IRB) Kabupaten Kampar	Sedang (72-66)	Sedang (66-61)	Sedang (61-54)	Sedang (54-48)
			Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana	Rendah (0,31-0,5)	Rendah (0,51-0,7)	Rendah (0,71-0,8)	Tinggi (0,81-0,10)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk men capai tujuan dan sasaran , strategi Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Kampar merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi, yang meliputi penetapan kebijakan dan program dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi.

Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya menetapkan arah dalam menentukan kegiatan-kegiatan dari program yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan internal diambil dalam rangka mengelola pelaksanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kebijakan internal ini telah dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Sementara kebijakan eksternal di tetapkan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana.

4.2.3 Strategi

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur dan melengkapi sarana prasarana dalam penanggulangan bencana
2. Menyusun, menyelaraskan, menjabarkan dan mengembangkan peraturan kebencanaan
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan dalam PRB dengan mengutamakan empowerment dan mendorong partisipasi masyarakat
4. Meningkatkan koordinasi antar institusi horizontal dan vertikal dalam melaksanakan pemulihan pasca bencana dengan menjalin kerja sama yang strategis yang berkelanjutan dengan memangku kepentingan

4.3.2 Kebijakan

1. Mengembangkan kapasitas SDM berdasarkan kompetensi

2. Mengembangkan BPBD sebagai institusi terdepan dalam penanggulangan bencana
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana berdasarkan kebutuhan
4. Mengutamakan empowerment, mendorong partisipasi masyarakat dalam PRB
5. Menjalinkan kerjasama yang strategis, berkelanjutan dengan pemangku kepentingan.

Tabel V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :			
Misi ke-2. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Pengembangan manajemen pemerintahan berbasis kinerja	Mengembangkan manajemen pemerintahan berbasis kinerja
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Penerapan standar pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi	Menerapkan standart pelayanan publik berbasis teknologi informasi
Misi ke-5. Mewujudkan pembangunan kawasan yang seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan			
2. (5.1) Mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Peningkatan pembangunan infrastruktur dan jaringan sarana prasarana yang merata	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan jaringan sarana prasarana yang merata
		Pengembangan system pemukiman secara terpadu	Mengembangkan system pemukiman secara terpadu
(5.2) mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pengelolaan hidup dan sumber daya alam	Peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya
		Peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan	Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya dan merupakan bagian dari program Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya menyangkut urusan perencanaan pembangunan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang akan memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi organisasi. Kegiatan yang disusun secara tahunan menjadi bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki program kerja operasional.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi program dan kegiatan lokalitas yang merupakan kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dan lintas SKPD. Oleh karena itu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen rencana strategis ini hanya mencakup program dan kegiatan yang pendanaannya dari APBD Kabupaten Kampar.

Penyusunan dan penetapan program dan indikasi kegiatan yang dikategorikan dalam rencana kerja yang akan dilaksanakan BPBD Kabupaten Kampar dalam periode 4 tahun mendatang Tahun 2023 s/d 2026. Adapun secara garis besar program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.4. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penanggulangan Bencana

2.1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

- a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
- b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

2.2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

- b. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- c. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan PRasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- d. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- e. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
- f. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- g. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- h. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- i. Penyusunan Rencana Kontinjensi
- j. Gladi kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- k. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
- l. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

2.3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- a. Respon cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
- b. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- c. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- d. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- e. Aktivasi System Komando Penanganan Darurat Bencana
- f. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit

2.4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- a. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- b. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
- c. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- d. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- e. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target dan Realisasi Kinerja Program dan kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah PJ	Lokasi
					Satuan	Target	2023		2024		2025		2026		target	Rp		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik				<i>Nilai system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)</i>	<i>Nilai</i>	<i>BB</i>	<i>BB</i>	<i>8.750.121.803</i>	<i>BB</i>	<i>10.597.412.559</i>	<i>A</i>	<i>11.657.153.815-</i>	<i>A</i>	<i>12.822.869.196</i>	<i>A</i>	<i>35.077.435.570</i>	<i>BPBD</i>	<i>Kab. Kampar</i>
				<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	<i>Level</i>	<i>87,98</i>	<i>87,98</i>	<i>-</i>	<i>91,98</i>	<i>-</i>	<i>93,97</i>	<i>-</i>	<i>95,97</i>	<i>-</i>	<i>95,97</i>		<i>BPBD</i>	<i>Kab. Kampar</i>
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah			<i>Persentase Pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>100</i>		<i>100</i>		<i>100</i>		<i>100</i>		<i>100</i>		<i>BPBD</i>	<i>Kab. Kampar</i>
		1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7.106.121.824</i>	<i>-</i>	<i>3.586.794.750</i>	<i>-</i>	<i>3.945.474.225</i>	<i>-</i>	<i>4.340.021.648</i>	<i>-</i>	<i>35.077.435.570</i>	<i>BPBD</i>	<i>Kab. Kampar</i>
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>71.487.974</i>	<i>-</i>	<i>78.636.771</i>	<i>-</i>	<i>86.500.448</i>	<i>-</i>	<i>95.150.493</i>	<i>-</i>	<i>260.287.712</i>	<i>BPBD</i>	<i>Kab. Kampar</i>
		1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7	7	22.136.474	7	24.350.121	7	26.785.133	7	29.463.646	28	80.598.901	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1	1	28.797.750	1	31.677.525	1	34.845.278	1	38.329.805	4	104.852.608	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1	1	6.885.900	1	7.574.490	1	8.331.939	1	9.165.133	4	25.071.562	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1	1	6.885.900	1	7.574.490	1	8.331.939	1	9.165.133	4	25.071.562	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1	1	6.781.950	1	7.460.145	1	8.206.160	1	9.165.133	4	24.693.080	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	5.0000.000	1	5.5000.000	1	6.0000.000	1	6.5000.000	4	24.0000.000	BPBD	Kab. Kampar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target dan Realisasi Kinerja Program dan kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah PJ	Lokasi
					Satuan	Target	2023		2024		2025		2026		target	Rp		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	-	-	3.219.235.127	-	3.541.158.639	-	3.895.274.503	-	4.284.801.953	-	11.721.235.095	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/Bulan	14	14	3.218.031.827	14	3.539.835.009	14	3.893.818.510	14	4.283.200.361	56	11.716.853.880	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1	1	1.203.300	1	1.323.630	1	1.455.993	1	1.601.592	4	4.381.215	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	-	-	1.000.000	-	125.000.000	-	137.500.000	-	151.250.000	500	413.750.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	125	125	1.000.000	125	125.000.000	125	137.500.000	125	151.250.000	500	413.750.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Umum Perangkat Daerah	%	-	-	741.409.200	-	904.650.139	-	995.115.153	-	1.094.626.668	-	2.994.391.960	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Palet Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1	1	50.157.100	1	60.672.810	1	66.740.091	1	73.414.100	4	200.827.001	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1	1	250.308.124	1	305.038.936	1	335.542.830	1	369.097.113	4	1.009.678.878	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1	1	80.414.030	1	99.455.453	1	109.400.998	1	120.341.098	4	329.197.549	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1	1	15.045.946	1	17.650.540	1	19.415.594	1	21.357.153	4	58.423.287	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	1	1	13.256.000	1	15.681.600	1	17.249.760	1	18.974.736	4	51.906.096	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100	100	332.228.000	100	406.150.800	100	446.765.880	100	491.442.468	400	1.344.359.148	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	-	-	435.000.000	-	505.000.000	-	555.500.000	-	611.050.000	-	1.671.550.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1	1	433.000.000	1	503.000.000	1	553.500.000	1	609.050.000	4	1.669.550.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	4	2.000.000.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1	1	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	1	2.000.000.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1	-	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	1	1.000.000.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	-	-	2.049.819.448	-	2.462.904.297	-	2.709.194.727	-	2.980.114.199	-	8.152.213.223	BPBD	Kab. Kampar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target dan Realisasi Kinerja Program dan kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah PJ	Lokasi
					Satuan	Target	2023		2024		2025		2026		target	Rp		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2	2	122.790.400	2	150.469.440	2	165.516.384	2	182.068.022	8	498.053.846	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.500.000	4	23.000.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.927.029.048	12	2.312.434.857	12	2.543.678.343	12	2.798.046.177	48	7.654.159.377	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	-	-	588.170.075	-	720.687.082	-	792.755.790	-	872.031.369	-	2.385.474.241	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6	6	336.231.900	8	411.655.090	9	452.820.599	10	498.102.659	33	1.362.578.348	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6	6	21.723.175	6	26.095.492	6	28.705.041	6	31.575.545	24	86.376.076	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3	3	229.215.000	3	281.936.500	3	310.230.150	3	341.353.165	12	935.519.815	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100.000.000	1	120.000.000	1	144.000.000	1	172.800.000	1	536.800.000	BPBD	Kab. Kampar
Menurunkan Resiko Bencana	Meningkatnya Sinergitas Penanggulangan Bencana	1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kampar	%	-	-	1.643.999.979	-	2.259.375.631	-	2.485.313.194	-	2.733.844.514	-	7.478.533.339	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kecamatan	21	21	295.196.420	21	361.016.062	21	397.117.668	21	436.829.435	84	1.194.963.165	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	44.560.000	1	54.516.000	1	59.967.600	1	65.964.360	84	180.447.960	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	100 Orang	100	100	250.636.420	100	306.500.062	100	337.150.068	100	370.865.075	400	1.014.515.205	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	-	-	4.862.836.130	-	5.973.419.743	-	6.714.461.717	-	795.8247.889	-	25.488.965.479	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	-	-	1	150.000.000	-	-	-	-	1	150.000.000	BPBD	Kab. Kampar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target dan Realisasi Kinerja Program dan kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah PJ	Lokasi
					Satuan	Target	2023		2024		2025		2026		target	Rp		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Kabupaten/Kota															
		1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	80	80	189.993.790	80	231.093.169	80	254.302.486	80	279.832.734	320	954.222.179	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	20.000.000	1	32.000.000	1	34.400.000	1	37.280.000	4	123.680.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas kebencanaan/pemadaman kebakaran	Unit	15	15	30.460.000	15	33.606.000	15	37.066.600	15	40.873.260	60	142.005.860	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	1	1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	1	100.000.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	5	5	100.000.000	5	120.000.000	5	144.000.000	5	172.800.000	20	536.800.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana	Paket	20	20	4.000.000.000	20	4.800.000.000	20	5.760.000.000	20	6.912.000.000	20	21.472.000.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	15	15	143.382.340	15	176.720.574	15	194.692.631	15	214.461.895	60	729.257.440	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	100.000.000	1	100.000.000	2	110.000.000	2	121.000.000	6	431.000.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	200	200	75.000.000	200	75.000.000	200	75.000.000	200	75.000.000	800	300.000.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	-	-	1	150.000.000	-	-	-	-	1	150.000.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	400	400.000.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	-	-	273.000.000	-	419.000.000	-	490.900.000	-	592.910.000	-	1.775.810.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	8	20.000.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	3	3	7.000.000	3	7.000.000	3	7.000.000	3	7.000.000	12	28.000.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan,	Orang	250	250	200.000.000	250	240.000.000	250	288.000.000	250	345.000.000	20	1.073.000.000	BPBD	Kab.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target dan Realisasi Kinerja Program dan kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah PJ	Lokasi
					Satuan	Target	2023		2024		2025		2026		target	Rp		
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Korban Bencana Kabupaten/Kota	Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana													Kampar	
		1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	250	250	100.000.000	250	110.000.000	250	120.000.000	250	130.680.000	250	460.000.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1	1	10.000.000	1	12.000.000	1	14.400.000	1	17.280.000	1	53.680.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	3	3	85.000.000	3	95.000.000	3	104.500.000	3	114.950.000	12	315.450.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	-	-	197.788.225	-	364.067.047	-	232.273.752	-	252.661.127	-	1.046.790.151	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	-	-	1	150.000.000	-	-	-	-	1	150.000.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	60.000.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	4	140.000.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	3	3	15.000.000	3	18.000.000	3	21.600.000	3	25.920.000	12	80.250.000	BPBD	Kab. Kampar
		1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	2	2	132.788.225	2	146.067.047	2	160.673.752	2	176.741.127	4	616.270.151	BPBD	Kab. Kampar

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencerminkan tujuan dan sasaran menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur, perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian tujuan dan sasaran secara makro, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja.

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPD	Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Jumlah regulasi yang disusun	Dok	1	1	1	1	1	4	
2	Jenis data yang dimiliki	Lap	5	5	5	5	5	5	
3	Jumlah masyarakat yang sudah menerima sosialisasi	Org	60	80	120	140	160	500	
4	Jumlah peralatan yang dimiliki untuk penanggulangan bencana	Unit	2	3	4	5	6	18	
5	Presentase petugas penanggulangan bencana yang mempunyai skill	%	10	15	20	25	30	100	
6	Presentase masyarakat yang menerima logistik bencana	%	30	40	50	60	70	100	
7	Jumlah infrastruktur/fasilitas terbangun	Paket	6	9	12	15	18	54	
8	Jumlah pendataan Kajian Risiko Bencana Kabupaten	Dokumen	1	1	1	1	1	4	

BAB VIII

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat di kemukakan kesimpulan dan harapan sebagai berikut :

1.1. Kesimpulan

Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar untuk Tahun 2023 s/d 2026 disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi negara dibidang penanggulangan bencana yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efesien, efektif serta tanggap terhadap keadaan dan lingkungan alam. Tujuan penyusunan rencana strategis adalah sebagai umpan balik (feedback) yang dapat digunakan sebagai manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1.2. Harapan

Rencana Strategis merupakan proses berkelanjutan, artinya renstra perlu dikaji secara terus menerus dan berkesinambungan, maka harapan yang diambil atas penyusunan renstraini adalah :

1. Mengajukan penetapan secara formal terhadap renstra yang dimiliki BPBD Kabupaten Kampar.
2. Melakukan pengembangan perencanaan strategis sesuai dengan perkembangan perubahan lingkungan strategis dan perencanaan strategis dilaksanakan dengan dukungan penuh dari BPBD Kabupaten Kampar.
3. Melakukan komunikasi tentang Visi dan Misi yang terencana dan sistematis keseluruh pegawai, sehingga adanya komitmen seluruh

Pegawai atas pelaksanaan tugas pokok dan lebih mengara pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, komunikasi juga perlu dilakukan kepada stakeholders (pengguna informasi), sehingga tercipta sistem umpan balik dalam penanggulangan bencana sehingga benar-benar bermanfaat pada pelaksanaan tugas.

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar 2023-2026 telah melalui serangkaian tahapan dan memperhatikan semua factor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal yang sangat cepat dan kompleks, oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya Renstra ini dapat dilakukan berbagai kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya.

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kampar



YURICHO EFRIL, S.STP
Pembina/NIP. 19820111 200212 1 001

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar 2023-2026 adalah dokumen perencanaan strategis yang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2023-2026.

Renstra merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sehingga program, kegiatan akan lebih terarah dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, lebih efisien dan akuntabel.

Dengan pertimbangan kondisi faktor lingkungan internal dan eksternal yang dinamis, Renstra sedapat mungkin diharapkan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diharapkan komitmen seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dapat memahami dan melaksanakan Renstra yang telah disusun.


Sesuai dengan tugas dan fungsi serta SOTK, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar harus mengedepankan koordinasi baik internal maupun eksternal pada setiap program dan kegiatan yang disusun. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana adalah urusan semua pihak.

Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar 2023-2026 telah melalui serangkaian tahapan dan memperhatikan semua faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal yang sangat cepat dan kompleks, oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya Renstra ini dapat dilakukan

berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya, terima kasih.

Bangkinang, Februari 2022

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kampar



YURICHO EFRIL, S.STP
NIP. 19820111 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur BPBD	7
2.2 Sumber Daya BPBD.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan BPBD.....	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BPBD	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD	26
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	32
3.3 Telaahan Renstra Propinsi Riau	32
3.4 Telaahan rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	32
3.5 Penentuan isu-isu strategis	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
1.1 Tujuan Jangka Menengah BPBD.....	36
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	42
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	49
BAB VIII PENUTUP.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.3	Pencapaian Daerah Perangkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20
Tabel. 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Kampar.....	21
Tabel. 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Sasaran Pembangunan Daerah.....	30
Tabel. 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD.....	38
Tabel. 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	41
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan BPBD.....	45
Tabel. 7.1	Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	49